



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Jl. Rusa No. 17 Sengkang 90911 Kab. Wajo Sul-Sel

Telp./Fax. (0485) 21269

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 dapat terlaksana sebagai bagian dari tahapan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Kabupaten Wajo Tahun 2026 merupakan perencanaan pembangunan daerah periode 2025 - 2029. Adapun visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 - 2029, Inspektorat Daerah masuk pada misi 2 (dua) yaitu “Membangun Sistem dan Budaya Birokrasi Yang Profesional dan Modern dengan Menghadirkan Pelayanan Publik Yang Mudah, Terjangkau, Cepat dan Tepat Bagi Seluruh Masyarakat” sebagaimana amanat RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 memuat pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, rencana program dan kegiatan serta pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dimaksud disusun dengan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029. Hal ini untuk mempertegas kedudukan, peran dan fungsi yang strategis keterkaitan antar dokumen dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kerja keras dan kerja sehingga Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Sengkang, 2 Oktober 2025



Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | iii |
| Daftar Tabel..... | iv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II | 9 |
| EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2024 | 9 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra | 9 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan | 17 |
| 2.2.1. Tugas, Fungsi, dan Kedudukan Organisasi | 18 |
| 2.2.2. Kinerja Pelayanan..... | 19 |
| 2.2.3. Pengolahan Data Informasi | 23 |
| 2.2.3.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... | 23 |
| 2.2.3.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) | 24 |
| 2.2.3.3. Indikator Tujuan dan Sasaran..... | 24 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi | 25 |
| 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD | 26 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 32 |
| BAB III..... | 33 |
| TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 33 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 33 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja | 34 |
| BAB IV | 44 |
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 44 |
| 4.1. Program dan Kegiatan | 44 |
| BAB V | 49 |
| PENUTUP..... | 49 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2024..... | 10 |
| Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan | 20 |
| Tabel 2.3. Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Kunci | 23 |
| Tabel 2.4. Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 | 24 |
| Tabel 2.5. Kinerja Pelayanan Indikator Tujuan Tahun 2024 | 24 |
| Tabel 2.6. Kinerja Pelayanan Indikator Sasaran Tahun 2024 | 25 |
| Tabel 2.7. Reviu Rancangan Awal RKPD..... | 27 |
| Table 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi..... | 33 |
| Table 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2026..... | 35 |
| Table 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 | 45 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Rencana kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Adapun tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
- c. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah
- d. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, Indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Wajo akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten



Wajo. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



- Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 14);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2025);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2026 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :



1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran Tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 ini disusun berdasarkan petunjuk penulisan sebagaimana diatur pada Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja

Subbab 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025; memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra tahun-tahun sebelumnya.

Subbab 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan; berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Subbab 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi; berisi formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajian terhadap tingkat capaian kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang.

Subbab 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD; berisi uraian tentang perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan beserta penjelasannya.



Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Subbab 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Subbab 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja; berisi rumusan tujuan dan sasaran beserta penjelasannya yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat.

Subbab 3.3. Program dan Kegiatan; berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan beserta penjelasannya.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan, berisi uraian detail rencana kerja dan pendanaan tahun berjalan.

Bab V Penutup, memuat catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan pencapaian kinerja Renstra Inspektorat dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun sampai dengan tahun berjalan 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2025

| Kode | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3) | | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2019 (tahun lalu /n-2) | | | | | Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2020 (tahun n-1) | | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | |
|--------------------|--|--|---|---------------|---|---------------|---|-------------|-----|-------------|---------|---|---|--|-------------------|---------|---------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Realisasi capaian | | Tingkat capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(7/6) | | 9 | | 10=(5+7+9)* | 11* | 12 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 4 | Fungsi Penunjang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100,00 | 2.953.790.000 | 29,33 | 2.793.862.007 | 100 | 497.572.300 | 100 | 480.369.194 | 100% | 96,54% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Waktu pelayanan jasa surat menyurat | 60,00 | 189.500.000 | 48,00 | 147.867.000 | 450 | 10.000.000 | 708 | 9.999.000 | 157% | 99,99% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | 60,00 | 280.500.000 | 48,00 | 221.515.197 | 12 | 67.000.000 | 12 | 59.201.584 | 100% | 88,36% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 60,00 | 40.500.000 | 48,00 | 26.567.890 | 12 | 8.000.000 | 12 | 3.378.445 | 100% | 42,23% | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | 36,00 | 18.000.000 | 36,00 | 18.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Waktu penyediaan alat tulis kantor | 24,00 | 10.000.000 | 24 | 10.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 4.02.4.02.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 24,00 | 10.000.000 | 12,00 | 6.250.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 4.995.000 | 100% | 99,90% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 60,00 | 95.000.000 | 48,00 | 78.890.000 | 12 | 55.200.000 | 12 | 55.050.000 | 100% | 99,73% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah | Waktu keterpenuhan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 60,00 | 2.310.290.000 | 48,00 | 2.148.581.670 | 12 | 249.799.800 | 12 | 245.783.015 | 100% | 98,39% | | | | | |



| Kode | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3) | | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2019 (tahun lalu /n-2) | | | | | Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2020 (tahun n-1) | | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | |
|--------------------|---|--|---|---------------|---|---------------|---|-------------|----|-------------|---------------|---|---|--|-------------------|---------|---------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Realisasi capaian | | Tingkat capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(7/6) | | 9 | | 10=(5+7+9)* | 11* | 12 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Penyediaan data dan pelaksanaan urusan kepegawaian | Waktu Penyediaan data dan pelaksanaan urusan kepegawaian (Bulan) | 24,00 | 270.510.000 | 12,00 | 165.440.250 | 12 | 102.572.500 | 12 | 101.962.150 | 100% | 99,40% | | | | | |
| | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | 108% | 90% | | | | | |
| | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | | | |
| 4.02.4.02.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | 2.993.891,371 | | 2.583.105,500 | | 242.800,000 | - | 226.762,845 | | 93,39% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.02.03 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia | 3,00 | 375.000.000 | 2,00 | 25.000.000 | 1 | 30.800,000 | 1 | 30.800,000 | 100% | 100,00% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.02.07 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia | 52,00 | 709.300.000 | 39,00 | 330.500,000 | 1 | 110.000,000 | 1 | 110.000,000 | 100% | 100,00% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.02.10 | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur yang disediakan | 30,00 | 75.400.000 | 30,00 | 75.400.000 | | - | - | - | | | | | | | |
| 4.02.4.02.01.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jenis mebeleur yang tersedia | 36,00 | 41.000.000 | 24,00 | 22.567.200 | 1 | 62.000,000 | 1 | 61.786,925 | 100% | 99,66% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jenis pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 60,00 | 332.000.000 | 48,00 | 272.768,200 | 1 | 40.000,000 | 1 | 24.175,920 | 100% | 60,44% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah gedung yang ipelihara | 60,00 | 1.088.573,371 | 48,00 | 30.825.000 | 0 | - | - | - | | | | | | | |
| 4.02.4.02.01.02.42 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang direhab | 60,00 | 372.618.000 | 48,00 | 1.826.045,100 | 0 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | 100% | 90% | | | | | |



| Kode | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3) | | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2019 (tahun lalu / n-2) | | | | | Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2020 (tahun n-1) | | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | |
|--------------------|---|---|---|---------------|---|---------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------------------|---|---------------|--|-------------------|---------|---------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | Target | | Realisasi | | Tingkat Realisasi (%) | | K | Rp | Realisasi capaian | | Tingkat capaian (%) |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(7/6) | | 9 | | 10=(5+7+9)* | 11* | 12 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| 4.02.4.02.01.05 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | % Tingkat Disiplin Aparatur | | 46.125.000 | | 46.125.000 | | | - | - | | | | | | | |
| 4.02.4.02.01.05.03 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan | 45,00 | 29.250.000 | 45,00 | 29.250.000 | | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan | 45,00 | 16.875.000 | 45,00 | 16.875.000 | | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | 0% | 0% | | | | |
| | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | |
| 4.02.4.02.01.26 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | % Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi | | 2.255.210.000 | | | | 100.000.000 | - | 100.000.000 | | 100,00% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.26.01 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 48,00 | 2.255.210.000 | 36,00 | 2.234.835.500 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 100% | 100,00% | | | | | |
| | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | |
| 4.02.4.02.01.26.02 | Program Perencanaan dan Pelaporan, Kinerja dan Keuangan | | | 78.200.000 | | 79.998.000 | | 14.700.000 | - | 14.620.000 | | - | 99,46% | | | | |
| 4.02.4.02.01. | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah Pelaporan Keuangan | 5,00 | | 4,00 | | 1 | | | | 100% | 98,64 | | | | | |



| Kode | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3) | | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2019 (tahun lalu / n-2) | | | | | Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2020 (tahun n-1) | | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | |
|--------------------|---|--|---|----------------|---|---------------|--|-------------------------------|---|---------------|---------------|---|---|--|-------------------|---------|---------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Realisasi capaian | | Tingkat capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(7/6) | | 9 | | 10=(5+7+9)* | 11* | 12 |
| 26.08 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| 26.08 | Akhir Tahun | Akhir Tahun | | 22.250.000 | | 20.000.000 | | 5.900.000 | 1 | 5.820.000 | | % | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07 | Penyusunan Renja SKPD | Jumlah dokumen Renja | 5,00 | 22.250.000 | 4,00 | 20.000.000 | 1 | 4.400.000 | 1 | 4.400.000 | 100% | 100,00% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.01 | Penyusunan LAKIP SKPD | Jumlah dokumen LAKIP | 5,00 | 33.700.000 | 4,00 | 39.998.000 | 1 | 4.400.000 | 1 | 4.400.000 | 100% | 100,00% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.02 | Asistensi penyusunan RKA Pokok dan RKA Perubahan | Jumlah dokumen asistensi penyusunan RKA dan RKAP | 2,00 | 5.000.000 | | | | | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 100% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | Predikat kinerja | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.04 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | | 10.380.558.813 | | 8.025.503.470 | | 2.518.109.400 | - | 2.465.846.604 | - | 97,92% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.06 | Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala | Jumlah pengawasan internal secara berkala | 182,00 | 3.787.925.000 | 111,00 | 3.063.070.000 | 1 | 1.257.140.000 | 1 | 1.228.825.000 | 100% | 97,75% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.07 | Penanganan Kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya | Jumlah kegiatan penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya | 60,00 | 1.201.150.000 | 48,00 | 1.022.950.000 | 1 | 142.100.000 | 1 | 140.265.000 | 100% | 98,71% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.08 | Inventarisasi temuan pengawasan | Jumlah kegiatan inventarisasi temuan pengawasan | 1 | 50.000.000 | | | | - | - | - | | | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.09 | Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | Jumlah kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | 60,00 | 425.300.000 | 48,00 | 530.573.302 | 0 | - | - | - | | | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.10 | Pengambilan data pra pemeriksaan | Jumlah kegiatan Pengambilan data pra pemeriksaan | | | | | | | - | - | | | | | | | |



| Kode | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3) | | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2019 (tahun lalu / n-2) | | | | | Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2020 (tahun n-1) | | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | |
|--------------------|---|---|---|-------------|---|-------------|--|-------------|-----|-------------|---------|---|---|--|-------------------|---------|---------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Realisasi capaian | | Tingkat capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(7/6) | | 9 | | 10=(5+7+9)* | 11* | 12 |
| 4.02.4.02.01.07.12 | Pelaksanaan dan pembinaan assesor PMPRB secara online | Jumlah kegiatan Pelaksanaan dan pembinaan assesor PMPRB secara online | 60,0 | 389.943.312 | 48,0 | 281.810.500 | 1 | 36.504.500 | 1 | 36.447.939 | 100% | 99,85% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.13 | Pemantauan rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi | Jumlah kegiatan Pemantauan rencana aksi daerah pencegahan pemberantasan korupsi | 60,0 | 391.000.000 | 48,0 | 307.329.120 | 1 | 50.000.000 | 1 | 49.828.730 | 100% | 99,66% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.14 | Pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Jumlah kegiatan Pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | 48,0 | 540.980.000 | 48,0 | 382.574.600 | 1 | 131.050.000 | 1,0 | 130.490.000 | 100% | 99,57% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.15 | Review LAKIP dan evaluasi SAKIP SKPD | Jumlah kegiatan Review LAKIP dan evaluasi SAKIP SKPD | 16,0 | 347.160.000 | 20,0 | 235.160.000 | 1 | 55.500.000 | 1 | 44.960.000 | 100% | 81,01% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.16 | Review RKA SKPD | Jumlah kegiatan review RKA SKPD | 12,0 | 275.760.000 | 16,0 | 161.650.000 | 1 | 87.120.000 | 1 | 84.320.000 | 100% | 96,79% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.17 | Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran PBJ (Pengadaan barang dan jasa) dan penyaluran dan penggunaan dana desa | Jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran PBJ (Pengadaan barang dan jasa) dan penyaluran dan penggunaan dana desa | | | | | | | | | - | | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.18 | Sistem Informasi manajemen hasil pengawasan dan whistle blowing system dan SIM-HP Desa | Jumlah kegiatan Sistem Informasi manajemen hasil pengawasan dan whistle blowing system | 36,0 | 239.000.000 | 24,0 | 135.595.000 | 1 | 76.500.000 | 1 | 76.436.806 | 100% | 99,92% | | | | | |
| 4.02.4.02.01.07.19 | Monitoring dan evaluasi kapabilitas APIP dan maturitas SPIP | Jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi kapabilitas APIP dan maturitas SPIP | 36,0 | 220.340.000 | 24,0 | 112.735.000 | 0 | 8.190.000 | - | 7.145.000 | | 87,24% | | | | | |
| | Pemberantasan Pungutan Liar | Jumlah kegiatan Pemberantasan Pungutan Liar | 36,0 | 831.750.000 | 24,0 | 761.249.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 196.758.000 | 100% | 98,38% | | | | | |



| Kode | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3) | | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2019 (tahun lalu / n-2) | | | | | Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2020 (tahun n-1) | | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | |
|------|---|---|---|-------------|---|-------------|--|-------------|------|-------------|---------|---|---|--|-------------------|---------|---------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Realisasi capaian | | Tingkat capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(7/6) | | 9 | | 10=(5+7+9)* | 11* | 12 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | Pengawasan Pemerintahan desa | Jumlah kegiatan Pengawasan Pemerintahan desa | 12,00 | 411.402.688 | 16,00 | 253.202.500 | 100 | 224.600.000 | 100 | 224.400.000 | 100% | 99,91% | | | | | |
| | Monitoring dan evaluasi pendampingan pencegahan tindak pidana korupsi | Jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi pendampingan pencegahan tindak pidana korupsi | 36,00 | 659.097.813 | 24,00 | 399.180.400 | - | - | - | - | | | | | | | |
| | Pengawasan Unit Pengendali Gratifikasi | Jumlah kegiatan Pengawasan Unit Pengendali Gratifikasi | 36,00 | 359.750.000 | 24,00 | 209.625.000 | 1 | 12.100.000 | 1 | 12.085.000 | 100% | 99,88% | | | | | |
| | Sinergitas APH dan APIP | waktu Sinergitas APH dan APIP | 12,00 | 150.000.000 | 12,00 | 139.084.048 | 0 | - | - | - | | | | | | | |
| | Pelaksanaan Gelar Pengawasan | Jumlah gelar pengawasan | 2,00 | 100.000.000 | 12,00 | 29.715.000 | 1 | 28.833.500 | 1 | 28.759.500 | 100% | 99,74% | | | | | |
| | Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi | | | | | | 1 | 39.702.400 | 1 | 39.621.572 | 100% | 99,80% | | | | | |
| | Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) | | | | | | 1 | 106.152.500 | 1,00 | 106.107.947 | 100% | 99,96% | | | | | |
| | Evaluasi Utang Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo | | | | | | 1 | 15.215.000 | 1 | 15.125.000 | 100% | 99,41% | | | | | |
| | Pemeriksaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo | | | | | | 1 | 15.215.000 | 1 | 12.265.000 | 100% | 80,61% | | | | | |



| Kode | Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2019 (akhir periode Renstra OPD) | | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3) | | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2019 (tahun lalu / n-2) | | | | | Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2020 (tahun n-1) | | Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) | | Catatan | |
|--|--|---|---|----------------|---|----------------|--|---------------|----|---------------|---------------|---|--------|--|-------------------|---------|---------------------|
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | Realisasi capaian | | Tingkat capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8=(7/6) | | 9 | | 10=(5+7+9)* | 11* | 12 |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | Peningkatan Kapabilitas APIP dan Moturitas SPIP | | | | | | 1 | 32.186.500 | 1 | 32.006.110 | 100% | 99,44% | | | | | |
| | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | 94% | 97% | | | | | |
| | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Tersedianya SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan | | 144.500.000 | | | | 225.600.000 | - | 214.488.730 | | | 95,07% | | | | |
| | Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat kempetensi | 15,00 | 144.500.000 | 9 | 187.248.900 | 15 | 225.600.000 | 15 | 214.488.730 | 100% | 95,07% | | | | | |
| | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | 100% | 95% | | | | | |
| | | | | | | | Predikat kinerja | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | 18.852.275.184 | | 13.528.593.977 | | 3.598.781.700 | - | 3.502.087.373 | | | | | | | |
| TOTAL RATA - RATA CAPAIAN DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM) | | | | | | | | | | | 97,25% | 95,17% | | | | | |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s. d. PROGRAM) | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | |



Dari tabel tersebut di atas, dapat disajikan beberapa data sebagai berikut:

1. Seluruh realisasi program/kegiatan telah mencapai target kinerja yang direncanakan. Keadaan tersebut adalah hasil dari dukungan pimpinan terhadap peran Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta kerja sama dan kekompakan personil Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
2. Terdapat 1 (satu) kegiatan dengan realisasi kinerja melebihi target kinerja, yakni kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Kondisi tersebut didukung oleh intensitas pengelolaan surat menyurat pada tahun 2025 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya seiring meningkatnya peran Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut berimplikasi pada pencapaian kinerja program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 108%. Keadaan tersebut diprediksi akan terus bertahan tidak hanya pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, seiring dengan penambahan alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan di tingkat daerah. Oleh karena itu, pada rencana kinerja tahun yang akan datang, perlu dilakukan perbaikan target kinerja yang lebih tinggi.
3. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja terlampir di atas adalah data pelaksanaan Renja Tahun sampai dengan tahun 2025 yang merupakan tahun akhir pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo 2025-2029. Sedangkan data pelaksanaan Renja pada tahun sebelumnya (n-1) Tahun 2025 adalah tahun awal pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo 2025-2029 dengan Program dan Kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat menjadi pembandingan kinerja Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo 2025-2029.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.



2.2.1. Tugas, Fungsi, dan Kedudukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 54 Tahun 2016 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Wajo No. 6 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo, Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

a. Inspektur

Tugas : membantu Bupati dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

b. Sekretaris

Tugas : membantu Inspektur dalam melaksanakan koordinasi dan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat yang meliputi mengkoordinasikan tugas bidang, perencanaan program, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, ketatausahaan, umum, perlengkapan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Tugas : melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

b. Sub Bagian Perencanaan

Tugas : menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana / program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

c. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Tugas : melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I

Tugas : melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah I.



d. Inspektur Pembantu Wilayah II

Tugas : melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah II.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III

Tugas : melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah III.

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Tugas : melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah di wilayah IV.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : melaksanakan fungsi pengawasan/pemeriksaan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2.2. Kinerja Pelayanan

Berikut terlampir rekapitulasi capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.



Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

| No | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------|-----|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | |
| | | | | (thn n-2) | (thn n-1) | (tnn n) | (thn n+1) | (thn n-2) | (thn n-1) | (thn n) | (thn n+1) | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 1 | Persentase tindak lanjut temuan | | IKK | 88,10% | 88,20% | 88,50% | 88,70% | 86,74% | 87,52% | 88,50% | 88,70% | |
| 2 | Persentase pelanggaran pegawai | | IKK | 0,03% | 0,12% | 0,11% | 0,11% | 0,03% | 0,00% | 0,07% | 0,07% | |
| 3 | Jumlah temuan BPK | | IKK | 43 | 49 | 45 | 42 | 53 | 43 | 45 | 42 | |
| 4 | Persentase penyelesaian kasus dan pengaduan masyarakat | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | Tahun 2024, realisasi penyelesaian kasus dan pengaduan masyarakat telah mencapai 100% pada triwulan ke-3. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya permintaan pemeriksaan dari stakeholder. Keadaan tersebut mengakibatkan perlunya penambahan anggaran penanganan kasus dan permintaan stakeholder pada semester ke-4 yang akan diakomodir pada Perubahan Renja Tahun 2025. |
| 5 | Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi | | | 88,1 | 88,2 | 88,5 | 88,7 | 87,52 | 88,20 | 88,5 | 88,7 | Data tindak lanjut didasarkan pada kondisi Juni 2025 |
| 6 | Persentase hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dengan kategori "B" | | | 12,2 | 12,2 | 24,39 | 29,27 | 20,75 | | 24,39 | 29,27 | Hasil evaluasi AKIP PD lingkup Pemkab. Wajo belum tersedia. Pelaksanaan evaluasi masih dalam progres. |



| No | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---|----------------------|-----|--------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | |
| | | | | (thn n-2) | (thn n-1) | (tnn n) | (thn n+1) | (thn n-2) | (thn n-1) | (thn n) | (thn n+1) | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 7 | Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | | | 0 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 0 | 0 | 2,44 | 2,44 | Persentase Perangkat Daerah yang Diusulkan Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah 0 (nol) dikarenakan Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan pada Tahun 2025 masih pada tahap pencaanangan pembangunan Zona Integritas, dan masih belum memenuhi syarat untuk pengusulan PD sebagai Zona Integritas |
| 8 | Indeks Reformasi Birokrasi | | | 55,54 | 57,5 | 60 | 62 | 57,54 | | 60 | 62 | Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB masih dalam tahap evaluasi oleh Kemepan RB |
| 9 | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | | Level 3 | Level 3 | Belum dilaksanakan evaluasi SPIP oleh BPKP |
| 10 | Level kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | | | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 3 | | Level 3 | Level 4 | Belum dilaksanakan evaluasi kapabilitas APIP oleh BPKP |
| 11 | Persentase Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKPNS) dengan kategori "baik" dengan nilai skala "85.28-90.00" | | | 80 | 80 | 82 | 87 | 100 | | 82 | 87 | PPKPNS diterbitkan pada akhir tahun anggaran |



| No | Indikator | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|----------------------|-----|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|--|
| | | | | Tahun 2026 | Tahun 2027 | Tahun 2028 | Tahun 2029 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2027 | |
| | | | | (thn n-2) | (thn n-1) | (tnn n) | (thn n+1) | (thn n-2) | (thn n-1) | (thn n) | (thn n+1) | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 12 | Nilai/Kategori Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah | | | 71,00-73,00 | 71,00-73,00 | 73,01-75,00 | 75,01-78,00 | - | | 73,01-75,00 | 75,01-78,00 | Nilai/Kategori Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah tidak terisi dikarenakan pelaksanaan hasil reviu atas AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo belum terbit. |
| 13 | Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) | | | 80 | 80 | 100 | 100 | 97,25 | 41,73 | 100 | 100 | Data capaian kinerja didasarkan pada laporan evaluasi dokumen perencanaan per Juni 2025 |
| 14 | Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi | | | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |



2.2.3. Pengolahan Data Informasi

2.2.3.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo sebagai berikut:

Tabel 2.3. Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Kunci

4.e.1 Maturitas Prnylrnggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

| No | Uraian | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----|----------------------|-------|------|------|------|------|
| 1 | Nilai Maturitas SPIP | 3,090 | | | | |

sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo

4.e.2. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

| No | Uraian | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----|------------------------|------|------|------|------|------|
| 1 | Nilai Kapabilitas APIP | 3,0 | | | | |

sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo

4.e.3. Manajemen Resiko Indeks

| No | Uraian | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----|--|-------|------|------|------|------|
| 1 | Nilai Manajemen Resiko Indeks (MRI) | 2,978 | | | | |
| 2 | Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | 2,718 | | | | |

sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo

4.e.4. Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) Tahun Anggaran N-1

| No | Uraian | 2016 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----|---|--------|------|------|------|------|
| 1 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi dan Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Kab.Wajo Tahun 2025 | 85,99% | | | | |

sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo 2025 tidak cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan teknis IKK pada tahun 2026. Hal tersebut mengharuskan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo memaksimalkan kinerjanya, terutama kinerja pengawasan. Adapun data ketercapaian kinerja pelayanan IKK Tahun 2025 telah tersedia. Angka-angka terlampir pada kolom Tahun 2025 adalah target kinerja pelayanan yang akan dicapai.



2.2.3.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4. Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

| No. | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--------|---------|-----------|---------|
| 1 | Persentase penyelesaian kasus dan pengaduan masyarakat | % | 100 | 100 | 100% |
| 2 | Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi | % | 88,10 | 85,99 | 98% |
| 3 | Persentase hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dengan kategori "B" | % | 12,2 | 20,75 | 170% |
| 4 | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level | Level 3 | Level 3 | 100% |
| 5 | Level kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | Level | Level 3 | Level 3 | 100% |

Target Indikator 5; Level kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah level 3,0 masih menggunakan nilai tahun 2024 disebabkan belum keluarnya nilai dari tim BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.3.3. Indikator Tujuan dan Sasaran

Berikut capain indikator Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo pada Tahun 2026:

Tabel 2.5. Kinerja Pelayanan Indikator Tujuan Tahun 2025

| Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Satuan | Target 2026 | Realisasi | Capaian |
|---|---|--------|-------------|-----------|---------|
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah | 1 Skor hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Skor | 3,0972 | 3,0972 | 100% |
| | 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai | C | CC | 100% |



| | | | | | | |
|--|---|---|-------|-----|-----|------|
| | 3 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Opini | WTP | WTP | 100% |
|--|---|---|-------|-----|-----|------|

Dalam mencapai Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo tersebut di atas, telah dicapai 3 Sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 11 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Kinerja Pelayanan Indikator Sasaran Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis | Jumlah Indikator | Rata-Rata Capaian |
|-----|---|------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya sistem pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah | 6 | 95% |
| 2 | Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 2 | 113% |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah | 3 | 111% |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo masih mengacu pada isu-isu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo 2025-2029 dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya selama pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2019 dan Tahun berjalan 2025. Isu-isu dimaksud antara lain:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik (Nilai SAKIP Pemerintah Tahun 2025 = B), meski begitu, tantangan ke depan terhadap SAKIP Kabupaten Wajo memaksa Pemerintah Kabupaten Wajo masih harus berbenah untuk dapat meningkatkannya nilai tersebut.
3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP kedepan diperkirakan akan berjalan lambat walaupun di tahun 2024 menunjukkan progres yang menggembirakan.



4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan mengedepankan peran sebagai *quality assurance* (menjamin kualitas dari suatu instansi).
5. Maturitas Kapabilitas APIP di awal Tahun 2024 sudah mendapat level 3 untuk penilaian Tahun 2025 dengan tetap mengedepankan profesionalisme APIP sebagai *quality assurance* bagi Bupati Wajo.
6. Meningkatnya beban pengawasan dari permintaan stakeholder internal dan eksternal, termasuk dari tuntutan pelaksanaan pengawasan dari Media Center for Prevention KPK.
7. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengharuskan sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan 2026 serta proses Perencanaan terhadap peraturan tersebut.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut hasil reviu terhadap target kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo pada Rancangan Awal RKPD 2026:



Tabel 2.7. Reviu Rancangan Awal RKPD

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-----------|---|----------------|----------------|--|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| | Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan | Kab. Wajo | Ketersediaan Renstra, Renja, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 183.100.000 | Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan | Kab. Wajo | Ketersediaan Renstra, Renja, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 183.100.000 | |
| | Penyusunan Renja Pokok PD | | Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Pokok yang disusun tepat waktu | 1 | 5.900.000 | Penyusunan Renja Pokok PD | | Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Pokok yang disusun tepat waktu | 1 | 5.900.000 | |
| | Penyusunan Renja Perubahan PD | | Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang disusun tepat waktu | 1 | 5.900.000 | Penyusunan Renja Perubahan PD | | Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang disusun tepat waktu | 1 | 5.900.000 | |
| | Penyusunan Perencanaan Anggaran | | Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun tepat waktu | 4 | 5.900.000 | Penyusunan Perencanaan Anggaran | | Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun tepat waktu | 4 | 5.900.000 | |
| | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi | | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun tepat waktu | 1 | 5.900.000 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi | | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun tepat waktu | 1 | 5.900.000 | |
| | Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun | | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu | 1 dokumen | 5.900.000 | Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun | | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu | 1 dokumen | 5.900.000 | |
| | Penyusunan pengendalian dan evaluasi Renstra dan Renja | | Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun tepat waktu | 1 | 5.900.000 | Penyusunan pengendalian dan evaluasi Renstra dan Renja | | Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun tepat waktu | 1 | 5.900.000 | |
| | Penyusunan Perjanjian Kinerja | | Jumlah dokumen Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu | 4 | 5.900.000 | Penyusunan Perjanjian Kinerja | | Jumlah dokumen Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu | 4 | 5.900.000 | |
| | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat | | Mutu Pelayanan | 2 | 30.000.000 | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat | | Mutu Pelayanan | 2 | 30.000.000 | |
| | Peningkatan Kapabilitas APiP | | Level kapabilitas Aparat Pengawas | 3 Level | 100.000.000 | Peningkatan Kapabilitas APiP | | Level kapabilitas Aparat Pengawas | 3 Level | 100.000.000 | |
| | Penyusunan Laporan PMPRB | | Jumlah dokumen laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 1 dokumen | 5.900.000 | Penyusunan Laporan PMPRB | | Jumlah dokumen laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 1 dokumen | 5.900.000 | |
| | Penyusunan Laporan Zona Integritas | | Jumlah dokumen laporan zona Integritas Perangkat Daerah | 1 | 5.900.000 | Penyusunan Laporan Zona Integritas | | Jumlah dokumen laporan zona Integritas Perangkat Daerah | 1 | 5.900.000 | |



| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|--|--------|--|---------------------------------|----------------|--|--------|--|---------------------------------|----------------|-----------------|
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| | Program Pemenuhan Penunjang Urusan | | Cakupan pemenuhan penunjang urusan | 100% | 2.389.638.595 | Program Pemenuhan Penunjang Urusan | | Cakupan pemenuhan penunjang urusan | 100% | 2.389.638.595 | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | | Jumlah surat keluar | 450 srt | 20.000.000 | Penyediaan jasa surat menyurat | | Jumlah surat keluar | 450 srt | 20.000.000 | |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | Frekuensi pembayaran tagihan telepon, internet, air dan listrik | 12 kl | 80.000.000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | Frekuensi pembayaran tagihan telepon, internet, air dan listrik | 12 kl | 80.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa administrasi keuangan | | Frekuensi pelaksanaan urusan keuangan terpenuhi | 12 bulan | 30.000.000 | Penyediaan Jasa administrasi keuangan | | Frekuensi pelaksanaan urusan keuangan terpenuhi | 12 bulan | 30.000.000 | |
| | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | Frekuensi perbaikan peralatan kerja | 12 kl | 35.000.000 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | Frekuensi perbaikan peralatan kerja | 12 kl | 35.000.000 | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | Jenis komponen instalasi listrik yang disediakan | 10 jns | 4.938.595 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | Jenis komponen instalasi listrik yang disediakan | 10 jns | 4.938.595 | |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 5 bahan bacaan dan peraturan UU | 100.000.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 5 bahan bacaan dan peraturan UU | 100.000.000 | |
| | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | | Frekuensi rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah | 50 kl | 450.000.000 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | | Frekuensi rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah | 50 kl | 450.000.000 | |
| | Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinannya | 22 Unt | 16.000.000 | Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinannya | 22 Unt | 16.000.000 | |
| | Penyediaan bahan kebersihan kantor | | Jenis bahan kebersihan kantor yang disediakan | 10 jns | 8.500.000 | Penyediaan bahan kebersihan kantor | | Jenis bahan kebersihan kantor yang disediakan | 10 jns | 8.500.000 | |
| | Penyediaan jasa Penunjang urusan | | Jumlah pengelola Administrasi penunjang urusan | 12 org | 43.200.000 | Penyediaan jasa Penunjang urusan | | Jumlah pengelola Administrasi penunjang urusan | 12 org | 43.200.000 | |
| | Penyediaan Pelaksanaan Urusan kepegawaian | | Frekuensi pelaksanaan urusan kepegawaian terpenuhi | 12 kl | 100.000.000 | Penyediaan Pelaksanaan Urusan kepegawaian | | Frekuensi pelaksanaan urusan kepegawaian terpenuhi | 12 kl | 100.000.000 | |
| | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional (Roda Dua) yang disediakan | 10 Unt | 200.000.000 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional (Roda Dua) yang disediakan | 10 Unt | 200.000.000 | |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | 5 Unt | 80.000.000 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | 5 Unt | 80.000.000 | |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor | | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 35 Unt | 300.000.000 | Pengadaan peralatan gedung kantor | | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | 35 Unt | 300.000.000 | |



| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|---|--------|--|----------------|----------------|---|--------|--|----------------|----------------|-----------------|
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| | Pengadaan mebeleur | | Jumlah mebeleur yang diadakan | 8 Unt | 76.000.000 | Pengadaan mebeleur | | Jumlah mebeleur yang diadakan | 8 Unt | 76.000.000 | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | Waktu pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor | 12 bulan | 165.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | Waktu pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor | 12 bulan | 165.000.000 | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas operasional | 12 kl | 70.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas operasional | 12 kl | 70.000.000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan | | Persentase pejabat fungsional bersertifikat profesi | 100% | 184.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan | | Persentase pejabat fungsional bersertifikat profesi | 100% | 184.000.000 | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Keahlian dan Kompetensi | | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan keahlian dan kompetensi (jp/org) | 60 | 400.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Keahlian dan Kompetensi | | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan keahlian dan kompetensi (jp/org) | 60 | 400.000.000 | |
| | Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) | | Frekuensi pelaksanaan PKS | 18 kl | 27.000.000 | Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) | | Frekuensi pelaksanaan PKS | 18 kl | 27.000.000 | |
| | Program Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | Persentase penurunan temuan yang berulang | 15% | 3.687.050.000 | Program Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | Persentase penurunan temuan yang berulang | 15% | 3.687.050.000 | |
| | Pelaksanaan Pengawasan Internal | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | 100% | 1.618.800.000 | Pelaksanaan Pengawasan Internal | | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | 100% | 1.618.800.000 | |
| | Penanganan Kasus pada Wilayah | | Persentase penanganan kasus dan pemeriksaan khusus dan tujuan tertentu | 100% | 652.880.000 | Penanganan Kasus pada Wilayah | | Persentase penanganan kasus dan pemeriksaan khusus dan tujuan tertentu | 100% | 652.880.000 | |
| | Pengawasan Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | Persentase laporan pengawasan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan | 100% | 1.065.370.000 | Pengawasan Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | Persentase laporan pengawasan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan | 100% | 1.065.370.000 | |
| | Penyelenggaraan Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah | | Jumlah sidang majelis Tuntutan Ganti | 5 kl | 170.000.000 | Penyelenggaraan Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah | | Jumlah sidang majelis Tuntutan Ganti | 5 kl | 170.000.000 | |
| | Pemantauan dan Penyelesaian Tindak | | Laporan data temuan dan tindak lanjut | 1 | 120.000.000 | Pemantauan dan Penyelesaian Tindak | | Laporan data temuan dan tindak lanjut | 1 | 120.000.000 | |
| | Pelaksanaan Gelar Pengawasan | | Pelaksanaan Gelar Pengawasan | 1 kegiatan | 60.000.000 | Pelaksanaan Gelar Pengawasan | | Pelaksanaan Gelar Pengawasan | 1 kegiatan | 60.000.000 | |



| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|---|--------|---|----------------|----------------|---|--------|---|----------------|----------------|-----------------|
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | 12% | 1.320.000.000 | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | 12% | 1.320.000.000 | |
| | | | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi | 27% | | | | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi | 27% | | |
| | | | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) | 27% | | | | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) | 27% | | |
| | Sinergitas APH dan APIP | | Laporan sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 1 | 60.000.000 | Sinergitas APH dan APIP | | Laporan sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 1 | 60.000.000 | |
| | Pemberantasan Pungutan Liar | | Laporan hasil pelaksanaan pemberantasan pungutan liar | 1 | 235.000.000 | Pemberantasan Pungutan Liar | | Laporan hasil pelaksanaan pemberantasan pungutan liar | 1 | 235.000.000 | |
| | Pengawasan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) | | Laporan hasil pengendalian gratifikasi | 1 laporan | 95.000.000 | Pengawasan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) | | Laporan hasil pengendalian gratifikasi | 1 laporan | 95.000.000 | |
| | Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) | | Laporan pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) | 1 | 65.000.000 | Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) | | Laporan pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) | 1 | 65.000.000 | |
| | Penyuluhan Anti Korupsi | | Frekuensi pelaksanaan penyuluhan anti korupsi | 3 kl | 50.000.000 | Penyuluhan Anti Korupsi | | Frekuensi pelaksanaan penyuluhan anti korupsi | 3 kl | 50.000.000 | |
| | Pelaksanaan dan Pembinaan Asesor | | Laporan reformasi birokrasi | 1 | 100.000.000 | Pelaksanaan dan Pembinaan Asesor | | Laporan reformasi birokrasi | 1 | 100.000.000 | |
| | Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi | | Laporan pembangunan zona integritas | 1 laporan | 100.000.000 | Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi | | Laporan pembangunan zona integritas | 1 laporan | 100.000.000 | |
| | Peningkatan Maturitas SPIP | | Laporan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1 | 85.000.000 | Peningkatan Maturitas SPIP | | Laporan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1 | 85.000.000 | |
| | Survei Penilaian Integritas | | Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas | 1 | 120.000.000 | Survei Penilaian Integritas | | Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas | 1 | 120.000.000 | |



| Rancangan Awal RKPD | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|--------------------------------------|--------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|--------|---|----------------|----------------|--|
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| | Pembinaan dan Monitoring Pelaporan | | Persentase Wajib Laport Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang menyampaikan Laporan Hasil | 100% | 60.000.000 | Pembinaan dan Monitoring Pelaporan | | Persentase Wajib Laport Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang menyampaikan Laporan Hasil | 100% | 60.000.000 | |
| | Konsultasi dan Coaching Clinic | | Jumlah laporan pemberian konsultasi dan coaching clinic | 1 | 50.000.000 | Konsultasi dan Coaching Clinic | | Jumlah laporan pemberian konsultasi dan coaching clinic | 1 | 50.000.000 | |
| | Sistem E-Controlling Keuangan Daerah | | Jumlah laporan pemberian konsultasi dan coaching clinic | 1 | 300.000.000 | Sistem E-Controlling Keuangan Daerah | | Jumlah laporan pemberian konsultasi dan coaching clinic | 1 | 300.000.000 | Nama kegiatan diganti dengan "Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi" untuk mengakomodir kegiatan berbasis teknologi informasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo |



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Wajo, tidak terdapat usulan Program maupun kegiatan dari masyarakat untuk diakomodir ke dalam Rencanan Kerja Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berikut identifikasi kebijakan nasional dan provinsi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo:

Table 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

| No. | Kebijakan Nasional / Provinsi | Sumber | Keterangan |
|-----|---|--|---|
| -1 | -2 | -3 | -4 |
| A | Nasional | | |
| 1 | Kebijakan pengawasan tahunan | Permendagri tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah diatur setiap tahun berupa Kebijakan Pengawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan yang berfokus pada sasaran dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Hingga saat ini, Permendagri tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 belum diterbitkan, sehingga perencanaan pengawasan dan pembinaan Inspektorat Daerah Kab. Wajo Tahun 2021 masih mengacu pada Kebijakan Pengawasan Tahun 2020. |
| B | Provinsi | | |
| 1 | Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien berbasis resiko | Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan | Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo telah menginisiasi pelaksanaan pengawasan berbasis risiko dan direncanakan tetap terlaksana dengan berbagai perbaikan dan pengembangan sistem |



| No. | Kebijakan Nasional / Provinsi | Sumber | Keterangan |
|-----|---|--------|---|
| -1 | -2 | -3 | -4 |
| 2 | Peningkatan monitoring, audit evaluasi, reviu | | Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo telah melaksanakan pengawasan berupa monitoring, audit, evaluasi dan reviu |
| 3 | Mengoptimalkan implementasi SPIP OPD | | Penilaian SPIP Kabupaten Wajo telah berada pada Level 3 dan terus dipertahankan dan ditingkatkan |
| 4 | Membuka jalur pengaduan | | Jalur pengaduan kasus dan pengawasan berdasarkan permintaan stakeholder telah dilaksanakan. Selanjutnya, Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo berencana mengembangkan sistem pengawasan dan membuka jalur pengaduan berbasis teknologi informasi |

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Adapun Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo 2019-2024 dengan target disesuaikan sebagaimana pada tabel berikut:



Table 2. Tujuan dan Sasaran Renja 2026

| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Renstra Inspektora t Daerah Kabupaten Wajo Tahun - 2026 |
|---|---------|----------------------|--|--|
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah | | | 1 Skor hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | 3,0985 |
| | | | 2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 55,01-60,00 |
| | | | 3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | WTP |
| Meningkatnya sistem pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah | | | 1 Persentase penyelesaian kasus dan pengaduan masyarakat | 100 |
| | | | 2 Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi | 88,5 |
| | | | 3 Persentase hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dengan kategori "B" | 24,39 |
| | | | 4 Persentase perangkat daerah yang diusulkan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | 2,44 |



| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Renstra Inspektora t Daerah Kabupaten Wajo Tahun - 2026 |
|--------|---------|---|--|--|
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| | | | 5 Indeks Reformasi Birokrasi | 60 |
| | | | 6 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Level 3 |
| | | Program Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase penurunan temuan yang berulang | 15 |
| | | Pelaksanaan Pengawasan Internal Prioritas | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | 100 |
| | | Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya | Persentase penanganan kasus dan pemeriksaan khusus dan tujuan tertentu | 100 |
| | | Pengawasan Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan pengawasan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan | 100 |
| | | Penyelenggaraan Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah | Jumlah sidang majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | 5 |
| | | Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | Laporan data temuan dan tindak lanjut | 1 |
| | | Pelaksanaan Gelar Pengawasan | Pelaksanaan Gelar Pengawasan | 1 |
| | | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1 Persentase perangkat daerah yang | |



| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Inspektora t Daerah Kabupaten Wajo Tahun - 2026 |
|--------|---------|---|--|--|
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| | | | telah melaksanakan : | |
| | | | a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | 12,19 |
| | | | b. Reformasi Birokrasi | 26,83 |
| | | | c. Sistem Pengendalian Intern (SPI) | 26,83 |
| | | Sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | Laporan sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 1 |
| | | Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar | Laporan hasil pelaksanaan pemberantasan pungutan liar | 1 |
| | | Pengawasan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) | Laporan hasil pengendalian gratifikasi | 1 |
| | | Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) | Laporan pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) | 1 |
| | | Penyuluhan Anti Korupsi | Frekuensi pelaksanaan penyuluhan anti korupsi | 3 |
| | | Pelaksanaan dan Pembinaan Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara Online | Laporan reformasi birokrasi | 1 |
| | | Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah | Laporan pembangunan zona integritas | 1 |



| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Renstra Inspektora t Daerah Kabupaten Wajo Tahun - 2026 |
|--------|--|--|--|--|
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| | | Bebas Korupsi | | |
| | | Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Laporan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1 |
| | | Survei Penilaian Integritas | Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas | 1 |
| | | Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Persentase Wajib Lapor Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | 100 |
| | | Konsultasi dan Coaching Clinic | Laporan pemberian konsultasi dan coaching clinic | 1 |
| | | Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi | Ketersediaan sistem informasi pengawasan | 3 |
| | Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | | 1 Persentase Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKNS) dengan kategori "baik" dengan nilai skala "85.28-90.00" | 82 |
| | | | 2 Level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | Level 3 |



| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Renstra Inspektora t Daerah Kabupaten Wajo Tahun - 2026 |
|--------|---------|--|--|--|
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| | | Program Pemenuhan Penunjang Urusan | Rata-rata capaian kinerja pelayanan penunjang urusan | 100 |
| | | Penyediaan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian | Frekuensi pelaksanaan urusan kepegawaian terpenuhi | 12 |
| | | Penyediaan Pelaksanaan Urusan Keuangan | Frekuensi pelaksanaan urusan keuangan terpenuhi | 12 |
| | | Penyediaan Jasa Administrasi Penunjang Urusan | Jumlah pengelola administrasi penunjang urusan | 12 |
| | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah | Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 40 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat keluar | 450 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan | Persentase pejabat fungsional bersertifikat profesi | 100 |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Keahlian dan Kompetensi | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan keahlian dan kompetensi (jp/org) | 60 |
| | | Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) | Rata-rata lama pegawai mengikuti PKS (jp/org) | 18 |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 5 |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Frekuensi pembayaran tagihan telpon, internet, air, dan listrik | 12 |



| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Renstra Inspektora t Daerah Kabupaten Wajo Tahun - 2026 |
|--------|--|--|---|--|
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| | | Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional | 22 |
| | | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Frekuensi perbaikan peralatan kerja | 12 |
| | | Penyediaan bahan kebersihan kantor | Jenis penyediaan bahan kebersihan kantor | 10 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis penyediaan komponen listrik | 10 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 12 |
| | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah pemeliharaan gedung kantor | 1 |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan | |
| | | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah pengadaan peralatan kantor | 35 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 5 |
| | | Pengadaan Mebeleur | Jumlah pengadaan mebeleur kantor | 8 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional | 10 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Jumlah rehabilitasi gedung kantor | |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan | | 1 Nilai/Kategori Akuntabilitas Kinerja Inspektorat | 73,01-75,00 |



| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Renstra Inspektora t Daerah Kabupaten Wajo Tahun - 2026 | |
|--------|---|----------------------|--|--|------------|
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | |
| | dan pengelolaan keuangan perangkat daerah | | Daerah | | |
| | | | 2 Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat Daerah | 100 | |
| | | | 3 Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi | 100 | |
| | | | Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan | 100 |
| | | | Penyusunan Renstra | Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun tepat waktu | |
| | | | Penyusunan Renstra Perubahan | Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang disusun tepat waktu | |
| | | | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pokok Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Pokok yang disusun tepat waktu | 1 |
| | | | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang disusun tepat waktu | 1 |
| | | | Penyusunan Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) | 4 |



| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Renstra Inspektora t Daerah Kabupaten Wajo Tahun - 2026 |
|--------|---------|--|---|--|
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| | | | yang disusun tepat waktu | |
| | | Penyusunan Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja | Jumlah dokumen Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu | 4 |
| | | Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) | Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun tepat waktu | 1 |
| | | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun tepat waktu | 1 |
| | | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu | 1 |
| | | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | Persentase keterpenuhan penilaian kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | 60 |
| | | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah | |
| | | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat | Mutu Pelayanan | B |
| | | Penyusunan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan | Jumlah dokumen laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan | 1 |



| Tujuan | Sasaran | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output) | Target Kinerja Renstra Inspektora t Daerah Kabupaten Wajo Tahun - 2026 |
|---------------|----------------|---|--|---|
| -1 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| | | Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | |
| | | Penyusunan Laporan Zona Integritas Perangkat Daerah | Jumlah dokumen laporan Zona Integritas Perangkat Daerah | 1 |
| | | | | |



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana operasional dalam mencapai Tujuan dan Sasaran di bab sebelumnya dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo melalui Program dan Kegiatan yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029. Selain itu, pada akhir dokumen ini, dilampirkan dokumen hasil pemetaan sinkronisasi nomenklatur Program dan Kegiatan pada Renstra dengan nomenklatur Program dan Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2026 sebagai berikut:



Table 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|----------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 0 0 9 | Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan | Ketersediaan Renstra, Renja, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | Kab. Wajo | 100% | 124.000.000 | APBD | | 100% | 124.000.000 |
| 0 0 9 0 | Penyusunan Renstra Perubahan | Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yang disusun tepat waktu | | 1 dok | 5.900.000 | | Penyusunan Renstra Perubahan direncanakan dilaksanakan pada Tahun ke-3 (2022) Renstra. Dengan terbitnya Permendagri 90/2019 yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian Program dan Kegiatan, maka kegiatan Penyusunan Renstra Perubahan PD dimajukan ke tahun ke-2 (2021) Renstra | 1 dok | 5.900.000 |
| 0 0 9 1 | Penyusunan Renja Pokok PD | Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Pokok yang disusun tepat waktu | | 1 dok | 5.900.000 | | | 1 dok | 5.900.000 |
| 0 0 9 2 | Penyusunan Renja Perubahan PD | Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang disusun tepat waktu | | 1 dok | 5.900.000 | | | 1 dok | 5.900.000 |
| 0 0 9 3 | Penyusunan Perencanaan Anggaran | Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun tepat waktu | | 4 dok | 5.900.000 | | | 4 dok | 5.900.000 |
| 0 0 9 4 | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi | Jumlah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun tepat waktu | | 1 dok | 5.900.000 | | | 1 dok | 5.900.000 |
| 0 0 9 5 | Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu | | 1 dok | 5.900.000 | | | 1 dok | 5.900.000 |
| 0 0 9 7 | Penyusunan pengendalian dan evaluasi Renstra dan Renja | Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun tepat waktu | | 1 dok | 1.900.000 | | | 1 dok | 5.900.000 |
| 0 0 9 8 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD | Jumlah dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun | | 1 dok | 5.900.000 | | Kegiatan Penyusunan SOP seharusnya terlaksana pada tahun ke-1 (2020) Renstra, namun pelaksanaannya terkendala refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19, karena itu dianggarkan kembali pada tahun ke-2 (2021) Renstra | 1 dok | |
| 0 0 9 25 | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat | Mutu Pelayanan | | Nilai B | 15.000.000 | | | Nilai B | 15.000.000 |
| 0 0 9 26 | Peningkatan Kapabilitas APIP | Level kapabilitas Aparat Pengawas | | Level 3 | 50.000.000 | | | Level 3 | 50.000.000 |
| 0 0 9 27 | Penyusunan Laporan PMPRB | Jumlah dokumen laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | | 1 dok | 5.900.000 | | | 1 dok | 5.900.000 |
| 0 0 9 28 | Penyusunan Laporan Zona Integritas | Jumlah dokumen laporan zona Integritas Perangkat Daerah | | 1 dok | 4.000.000 | | | 1 dok | 5.900.000 |
| 0 0 9 33 | Penyusunan Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian | Jumlah dokumen Rencana Aksi Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu | | 4 dok | 5.900.000 | | | 4 dok | 5.900.000 |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | | | | |
|------|---|-------------------------------------|--------------------|--|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------------|---------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | | | |
| | | Kinerja | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 10 | | Program Pemenuhan Penunjang Urusan | Cakupan pemenuhan penunjang urusan | | 100% | 2.531.189.944 | | | 100% | 2.531.189.944 |
| 0 | 0 | 10 | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah surat keluar | | 450 srt | 15.000.000 | | | 450 srt | 15.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Frekuensi pembayaran tagihan telepon, internet, air dan listrik | | 12 kl | 100.000.000 | | | 12 kl | 100.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 7 | Penyediaan Jasa administrasi keuangan | Frekuensi pelaksanaan urusan keuangan terpenuhi | | 12 kl | 30.000.000 | | | 12 bulan | 30.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 9 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Frekuensi perbaikan peralatan kerja | | 12 kl | 35.000.000 | | | 12 kl | 35.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jenis komponen instalasi listrik yang disediakan | | 10 jns | 9.489.944 | | | 10 jns | 9.489.944 |
| 0 | 0 | 10 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | | 5 bahan bacaan | 100.000.000 | | | 5 bahan bacaan | 100.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah | Frekuensi rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah | | 50 kl | 350.000.000 | | | 50 kl | 350.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 19 | Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa perizinannya | | 23 Unt | 20.000.000 | | | 33 Unt | 20.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 20 | Penyediaan bahan kebersihan kantor | Jenis bahan kebersihan kantor yang disediakan | | 10 jns | 8.500.000 | | | 10 jns | 8.500.000 |
| 0 | 0 | 10 | 21 | Penyediaan jasa Penunjang urusan | Jumlah pengelola Administrasi penunjang urusan | | 12 org | 43.200.000 | | | 12 org | 43.200.000 |
| 0 | 0 | 10 | 22 | Penyediaan Pelaksanaan Urusan kepegawaian | Frekuensi pelaksanaan urusan kepegawaian terpenuhi | | 12 kl | 180.000.000 | | | 12 kl | 180.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 27 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional (Roda Dua) yang disediakan | | 12 Unt | 240.000.000 | | | 10 Unt | 240.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 29 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan | | 5 Unt | 110.000.000 | | | 5 Unt | 110.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 31 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan | | 35 Unt | 350.000.000 | | | 35 Unt | 350.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 32 | Pengadaan mebeleur | Jumlah mebeleur yang diadakan | | 8 Unt | 76.000.000 | | | 8 Unt | 76.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 35 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Waktu pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor | | 12 bulan | 150.000.000 | | | 12 bulan | 150.000.000 |
| 0 | 0 | 10 | 37 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan | Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas operasional | | 12 kl | 90.000.000 | | | 12 kl | 90.000.000 |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-----------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| | dinas/operasional | | | | | | | | |
| 0 0 10 69 | Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan | Persentase pejabat fungsional bersertifikat profesi | | 100% | 184.000.000 | | | 100% | 184.000.000 |
| 0 0 10 70 | Pendidikan dan Pelatihan Keahlian dan Kompetensi | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan keahlian dan kompetensi (jp/org) | | 60 | 400.000.000 | | | 60 | 400.000.000 |
| 0 0 10 71 | Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) | Frekuensi pelaksanaan PKS | | 18 kl | 40.000.000 | | | 18 kl | 40.000.000 |
| 4 6 28 | Program Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase penurunan temuan yang berulang | | 20% | 3.652.009.750 | | | 15% | 3.652.009.750 |
| 4 6 28 1 | Pelaksanaan Pengawasan Internal Prioritas | Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | | 100% | 1.593.800.000 | | | 100% | 1.593.800.000 |
| 4 6 28 2 | Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya | Persentase penanganan kasus dan pemeriksaan khusus dan tujuan tertentu | | 100% | 668.330.000 | | | 100% | 668.330.000 |
| 4 6 28 3 | Pengawasan Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan pengawasan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan | | 100% | 1.070.570.000 | | | 100% | 1.070.570.000 |
| 4 6 28 4 | Penyelenggaraan Majelis Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah | Jumlah sidang majelis Tuntutan Ganti | | 5 kl | 160.395.750 | | | 5 kl | 160.395.750 |
| 4 6 28 5 | Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | Laporan data temuan dan tindak lanjut | | 1 | 100.000.000 | | | 1 | 100.000.000 |
| 4 6 28 6 | Pelaksanaan Gelar Pengawasan | Pelaksanaan Gelar Pengawasan | | 1 keg. | 58.914.000 | | | 1 keg. | 58.914.000 |
| 4 6 29 | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | | 2,44% | 1.173.938.000 | | | 2,44% | 1.173.938.000 |
| | | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi | | 62% | | | | 62% | |
| | | Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) | | Level 3 | | | | Level 3 | |
| 4 6 29 1 | Sinergitas APH dan APIP | Laporan sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | | 1 lap. | 56.000.000 | | | 1 lap. | 56.000.000 |



| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2026 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 | |
|-----------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 4 6 29 2 | Pemberantasan Pungutan Liar | Laporan hasil pelaksanaan pemberantasan pungutan liar | | 1 lap. | 224.600.000 | | | 1 lap. | 224.600.000 |
| 4 6 29 3 | Pengawasan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) | Laporan hasil pengendalian gratifikasi | | 1 lap. | 91.338.000 | | | 1 lap. | 91.338.000 |
| 4 6 29 4 | Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) | Laporan pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) | | 1 lap. | 65.000.000 | | | 1 lap. | 65.000.000 |
| 4 6 29 5 | Penyuluhan Anti Korupsi | Frekuensi pelaksanaan penyuluhan anti korupsi | | 3 keg. | 50.000.000 | | | 3 keg. | 50.000.000 |
| 4 6 29 6 | Pelaksanaan dan Pembinaan Asesor PMPRB Secara Online | Laporan reformasi birokrasi | | 1 lap. | 70.000.000 | | | 1 lap. | 70.000.000 |
| 4 6 29 7 | Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi | Laporan pembangunan zona integritas | | 1 lap. | 70.000.000 | | | 1 lap. | 70.000.000 |
| 4 6 29 8 | Peningkatan Maturitas SPIP | Laporan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | | 1 lap. | 70.000.000 | | | 1 lap. | 70.000.000 |
| 4 6 29 9 | Survei Penilaian Integritas | Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas | | 1 lap. | 120.000.000 | | | 1 lap. | 120.000.000 |
| 4 6 29 10 | Pembinaan dan Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN | Persentase Wajib Lapo Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang menyampaikan Laporan Hasil | | 100% | 40.000.000 | | | 100% | 40.000.000 |
| 4 6 29 11 | Konsultasi dan Coaching Clinic | Jumlah laporan pemberian konsultasi dan coaching clinic | | 1 keg. | 17.000.000 | | | 1 keg. | 17.000.000 |
| 4 6 29 12 | Sistem E-Controlling Keuangan Daerah | Laporan Hasil Survey Penilaian Integritas | | | | | | | |
| 4 6 29 14 | Whistle Blowing System | Jumlah laporan pemberian konsultasi dan coaching clinic | | | | | | | |
| 4 6 29 0 | Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi | Ketersediaan sistem informasi pengawasan | | 3 sistem | 300.000.000 | | Tiga kegiatan sebelumnya bersifat sama sehingga diganti dengan "Pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi" untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan berbasis teknologi informasi | 3 sistem | 300.000.000 |
| JUMLAH | | | | | 7.481.137.694 | | | | 7.481.137.694 |



BAB V

PENUTUP

Akhir Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat diketahui target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo dalam mendukung pencapaian visi Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yaitu “wajo maradeka” (maju, religius, bermartabat, terdepan, berkeadilan”.

Sengkang, 2 Oktober 2025



